

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa mendatang. Karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran sering kali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting. Artinya, segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang sehingga pencapaian efisiensi dan efektivitas dapat diukur dari kegiatan yang dilakukan (Fuad, 2020).

B. Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik (Sujarweni, 2020). Menurut *Governmental Accounting Standarts Board (GASB)*, definisi anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran itu berbentuk suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.

Secara singkat anggaran sektor publik merupakan suatu rencana keuangan yang menyatakan:

- a. Berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat.
- b. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut.

C. Akuntansi Sektor Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi disetiap instansi pemerintah di Indonesia, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun satuan kerja di dalamnya. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Dengan demikian, akuntansi ini merupakan proses pengolahan semua transaksi dan atau aktivitas keuangan yang ada disetiap entitas pemerintah untuk

kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi pada entitas pemerintahan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam suatu proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada periode selanjutnya (Masnila, 2021).

D. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menurut Rubenstein dan Mardiasmo (Fuad, 2020) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama antara lain yaitu:

1) Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.

- Menentukan indikator kinerja dan tingkat penyelenggaraan strategi.

2) Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rincian atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat diperuntukan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan kontes pemborosan-pemborosan. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

3) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Setiap unit pemerintahan terlihat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran kerja yang disusun dengan baik akan mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit dalam penyelenggaraan tujuan organisasi. Selain itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

4) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dari pemegang anggaran (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja akan didasarkan pada penilaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk mengendalikan dan menilai kinerja.

E. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas (Fitra, 2019):

1. Belanja

Semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Transfer

Penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

F. Perhitungan Tingkat Efisiensi

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2019). Rasio efisiensi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$